BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Konseptual

1. Konsep Administrasi Pembangunan

a. Pengertian administrasi pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan gabungan dari dua kata yaitu administrasi dan pembangunan. Kedua kata tersebut memiliki makna secara terpisah. Dalam bahasa latin, *administrare* mempunyai arti mengurus. Dari makna tersebut, E.N. Gladden merumuskan definisi administrasi sebagai mengurus atau mengawasi orang dan mengolah masalah-masalah.[5]

Pada dasarnya terdapat dua pengertian administrasi, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan dan memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit ini lebih tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk

[5] Muhammad A. Al-Buraey, *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*. Terjemahan oleh Achmad Nashir Budiman (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai tujuan secara efektif dan efisien.[6] Jadi, pengertian secara luas ini mencangkup unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan dicapai dan pemanfaatan berbagai sumber.

Waldo menyatakan bahwa administrasi berada dalam keluarga kegiatan kerjasama antar manusia, tetapi perbedaannya dengan kerjasama antar manusia lainnya adalah derajat rasionalitasnya yang tinggi, yakni ditunjukkan oleh tujuan yang ingin dicapai serta cara untuk mencapainya.[7] Dari beberapa pengertian di atas, intinya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan dua atau banyak orang yang terlibat di dalamnya.

Sedangkan Pembangunan berasal dari kata bangun yang berarti sadar, siuman, bangkit, berdiri dan juga berarti bentuk. Jika dilihat sebagai kata kerja, bangun berarti membuat, mendirikan atau membina.[8] Istilah pembangunan merupakan bahasa yang sudah mendunia, terutama mengenai negara dan bangsa. Istilah pembangunan sudah meluas dalam media massa di seluruh dunia dan kerap kali dibincangkan oleh semua lapisan masyarakat baik di belahan timur

---

[6] Hendi Haryadi, *Administrasi Perkantoran untuk Manajer & Staf* (Jakarta: Visimedia, 2009), hlm. 1

[7] Ginandjar Kartasasmita, *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1997), hlm. 8

[8] Agus Sujono dan Trilaksono Nugroho, *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah* (Malang: Bayumedia dan Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA-UNIBRAW, 2008), hlm. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun belahan barat, terutama di kalangan politik, wartawan dan pakar ilmu sosial.

Johan Galtung memaparkan, pembangunan merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.[9] Tokoh lain menyebutkan bahwa pembangunan merupakan perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.[10] Hal yang pasti terdapat dalam pembangunan adalah tujuan pada perubahan yang lebih baik, bukan perubahan pada yang lebih buruk. Pencapaian tujuan tersebut diperlukan upaya-upaya yang direncanakan secara baik dan matang. Upaya tersebut dirupakan dalam bentuk program-program pembangunan.

Administrasi pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif.[11] Gant, salah seorang tokoh

---

[9] Lambang Trijono, *Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 1

[10] Ginandjar Kartasasmita, *Administrasi Pembangunan*... (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1997), hlm. 9

[11] Bintoro Tjokroamidjojo, *Kebijakan dan Administrasi Pembangunan, Perkembangan Teori dan Penerapan* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

administrasi pembangunan merumuskan administrasi pembangunan sebagai penyempurnaan birokrasi (aparatur pemerintah) dalam menghadapi meningkatnya jumlah, jenis dan kompleksitas fungsi-fungsi pemerintahan untuk memenuhui berbagai kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.[12]

Tokoh lain menyebutkan bahwa administrasi pembangunan adalah suatu mekanisme yang berorientasi pada tindak (*action-oriented*) yang dimaksudkan untuk melaksanakan kebijaksanaan, program dan proyek-proyek guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.[13] Disebutkan pula bahwa administrasi pembangunan adalah suatu usaha daya upaya manusia secara koordinatif mengatur dan melaksanakan pembangunan itu dengan baik sesuai rencana.[14]

Administrasi pembangunan mulai berkembang seiring dengan banyaknya perhatian terhadap berbagai masalah pembangunan, yaitu sejak berakhirnya Perang Dunia II. Administrasi pembangunan lahir dari kesadaran tentang diperlukannya berbagai pendekatan disipliner untuk mensukseskan usaha-usaha pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi negara- negara berkembang.

b. Ruang lingkup administrasi pembangunan

Administrasi pembangunan bersumber dari administrasi negara. Dengan demikian kaidah-kaidah umum administrasi negara

---

[12] *Ibid*,. hlm. 83

[13] Muhammad A. Al-Buraey, *Islam: Landasan Alternatif*... Terjemahan oleh Achmad Nashir Budiman (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 236

[14] A.W. Widjaja dan M. Arsyik Hawab, *Komunikasi, Administrasi, Organisasi dan Manajemen dalam Pembangunan* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku pada administrasi pebangunan. Tetapi administrasi pembangunan memberi perhatian lebih luas daripada hanya membahas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam pengertiam umum. Proses-proses dalam administrasi pembangunan merupakan segi-segi yang esensial di dalam penyelenggaraan pembangunan. Waterston di dalam suatu studi yang cermat tentang pengalaman-pengalaman dalam hal perencanaan pembangunan di berbagai negara, menyimpulkan bahwa keterbatasan yang nyata di dalam melaksanakan pembangunan bukanlah semata-mata karena kekuranngan dana, melainkan justru karena ketidakmampuan administratif.[15]

Administrasi pembangunan bersifat dinamis dan inovatif, karena menyangkut upaya mengadakan perubahan-perubahan sosial. Dalam upaya itu, administrasi pembangunan sangat berkepentingan dan terlibat dalam pengerahan sumber daya dan pengalokasiannya untuk kegiatan pembangunan.[16]

Terdapat beberapa kegiatan dalam proses administrasi pembangunan, diantaranya ialah:[17]

1) *Organizing*

Organizing adalah proses pengelompokan dari sumber-sumber yang bersifat manusia dan non manusia sedemikian rupa sehingga

---

[15] Saul M. Katz, *Modernisasi Administrasi untuk Pembangunan Nasional*. Terjemahan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 8

[16] Ginandjar Kartasasmita, , *Administrasi Pembangunan*... (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1997), hlm. 35

[17] A.W. Widjaja dan M. Arsyik Hawab, *Komunikasi, Administrasi*... (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 15-16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercipta suatu organisasi yang merupakan suatu kesatuan untuk digerakkan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian ini dalam proses administrasi pembangunan berarti melaksanakan, mengawasi dan menilai kegiatan pembangunan harus diselaraskan dan disesuaikan dengan tujuan pembangunan itu sendiri.

2) *Staffing*

Dalam proses administrasi pembangunan, *staffing* adalah keseluruhan proses penempatan personal. Pembangunan memerlukan tenaga-tenaga ahli yang sesuai dengan bidang-bidang atau jenis pekerjaan yang tersedia. Tenaga-tenaga ahli tersebut akan produktif bila ditempatkan pada tempatnya dan begitu juga sebaliknya.

Administrasi pembangunan ini meliputi kebijakan, program dan proyek untuk mendukung tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi, yaitu:

1) Penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara, meliputi bidang organisasi, kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan sarana administrasi.
2) Administrasi proses pembangunan, yaitu penyempurnaan administrasi untuk mendukung perumusan kebijakan dan program-program pembangunan serta pelaksanaannya secara efektif.[18]

---

[18] Bintoro Tjokroamidjojo, *Kebijakan dan Administrasi*... (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Konsep kebijakan pembangunan

Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.[19] Dengan demikian, kebijakan menunjuk pada serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan juga bisa diartikan sebagai proses yang meliputi proses pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Dalam kenyataannya, kata kebijakan sering digunakan dan dipertukarkan maknanya dengan tujuan, program, hukum dan keputusan. Penggunaan dan pemaknaan tersebut bergantung pada kepentingan dan acuan khusus oleh kelompok tertentu. Menurut Easton, kebijakan diartikan sebagai pola aktivitas yang secara otoritatif mengalokasikan nilai untuk masyarakat.[20]

Betapapun banyaknya definisi yang diberikan oleh para ahli, terdapat gagasan yang sama, yaitu:

1) Tindakan bertujuan, yang diarahkan terhadap masalah atau tujuan.
2) Tindakan yang diambil oleh dinas-dinas pemerintah atau kolektivitas yang bisa didefinisikan sebagai dinas pemerintah.
3) Aturan yang mencirikan siapa harus melakukan apa, kapan, mengapa dan bagaimana.

---

[19] Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu* (Yogyakarta: Gava Media, 2008), hlm. 59

[20] Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Evaluasi Kebijakan Publik: Penjelasan, Analisis & Transformasi Pikiran Nagel* (Yogyakarta: Balairung & Co, 2003), hlm. 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

4) Perangkat yang memberikan insentif dan motivasi agar individu melakukan perilaku pilihan kebijakan.[21]

Dengan demikian kebijakan pembangunan pada dasarnya adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau pengambil keputusan publik untuk mewujudkan suatu kondisi pembangunan atau masyarakat yang diinginkan.

Dalam prosesnya, kebijakan memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui. Diungkapkan oleh Shafritz dan Russell, terdapat lima tahapan yaitu agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, implementasi, evaluasi program dan analisis dampak, dan yang terakhir adalah *feedback.*[22] Suatu kebijakan sebelum direncanakan dan kemudian diputuskan, haruslah dilakukan analisis kebijakan. Yaitu penstrukturan masalah atau identifikasi masalah, identifikasi alternatif, seleksi alternatif dan pengusulan alternatif terbaik atau proyek yang akan diimplementasikan.

Tahap implementasi program kebijakan, seringkali tidak dilihat arti pentingnya. Implementasi ini hanya dimaknai sebagai pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan sehingga kurang berpengaruh. Padahal kenyataannya, sebaik apapun perencanaan program namun jika tidak direalisasikan dengan baik dan benar, maka program tersebut akan sia-

[21] *Ibid.*, hlm. 120

[22] Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis...* (Yogyakarta: Gava Media, 2008), hlm. 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sia saja. Oleh karena itu, implementasi ini membutuhkan pelaksana yang bertanggungjawab, jujur, memiliki kompetensi yang sesuai dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuannya. Tetapi sayangnya, implementasi ini seringkali bermuatan politik yang digunakan alat untuk melayani kepentingan kelompok-kelompok tertentu dan mereka yang berkepentingan berusaha mempengaruhi. Sehingga keberhasilan implementasi program seringkali menjadi tanda tanya yang tidak membutuhkan jawaban.

Disampaikan oleh D.L.Weimer dan Aidan R.Vining bahwa keberhasilan implementasi atau realisasi program dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:[23]

1) Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
2) Hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan *assembling* yang produktif.
3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

[23] *Ibid.*, hlm. 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketiga faktor tersebut, keberhasilan atau kegagalan implementasi program dapat diketahui dan diukur. Sehingga dapat mempermudah proses monitoring dan evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dilakukan selama dan setelah implementasi program. Di dalam proses monitoring dilakukan pengamatan langsung ke lapangan dari hasil-hasil sementara untuk dinilai tingkat efektivitas dan efisiensinya. Sedangkan evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program dan mempengaruhi respons dari mereka yang berada di luar lingkungan politik.[24] Dalam monitoring dan evaluasi ini diperlukan indikator yang kuat untuk mengukur keberhasilan dari program kebijakan.

Dari hasil monitoring dan evaluasi program, dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu *feedback*. Merupakan tahap keputusan untuk merevisi atau menghentikan program kebijakan pembangunan. Jika hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan hasil yang baik, maka pada tahap *feedback* ini juga pastinya diputuskan hal yang positif dan begitu juga sebaliknya.

[24] *Ibid.*, hlm. 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Efektivitas dan Efisiensi Program Pembangunan

Suatu program dari kebijakan pembangunan yang sudah direalisasikan tentunya mengahasilkan dampak tertentu. Baik itu berupa kemajuan yang mengisyaratkan keberhasilan atau malah kemunduran yang mengisyaratkan kegagalan. Oleh karenanya, perlu dilakukan pengukuran kinerja terhadap program tersebut. Hasil dari pengukuran kinerja ini yang kemudian dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan suatu program pembangunan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja diperlukan adanya indikator-indikator tertentu. Indikator tersebut hendaknya difokuskan pada sektor-sektor yang vital dalam arti sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun indikator .yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran kinerja suatu program pembangunan antara lain *input*, *output* dan *outcome*. Ketiga indikator tersebut layak digunakan untuk menggambarkan keberhasilan program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi.

Oleh Pollit dan Bouckaert, model pengukuran keberhasilan dengan menggunakan indikator *input*, *output* dan *outcome* digambarkan dalam skema berikut:[25]

[25] Fadel Muhammad, *Reinventing Local Governmen: Pengalaman Dari Daerah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagan 1: Model Pengukuran Kinerja Program

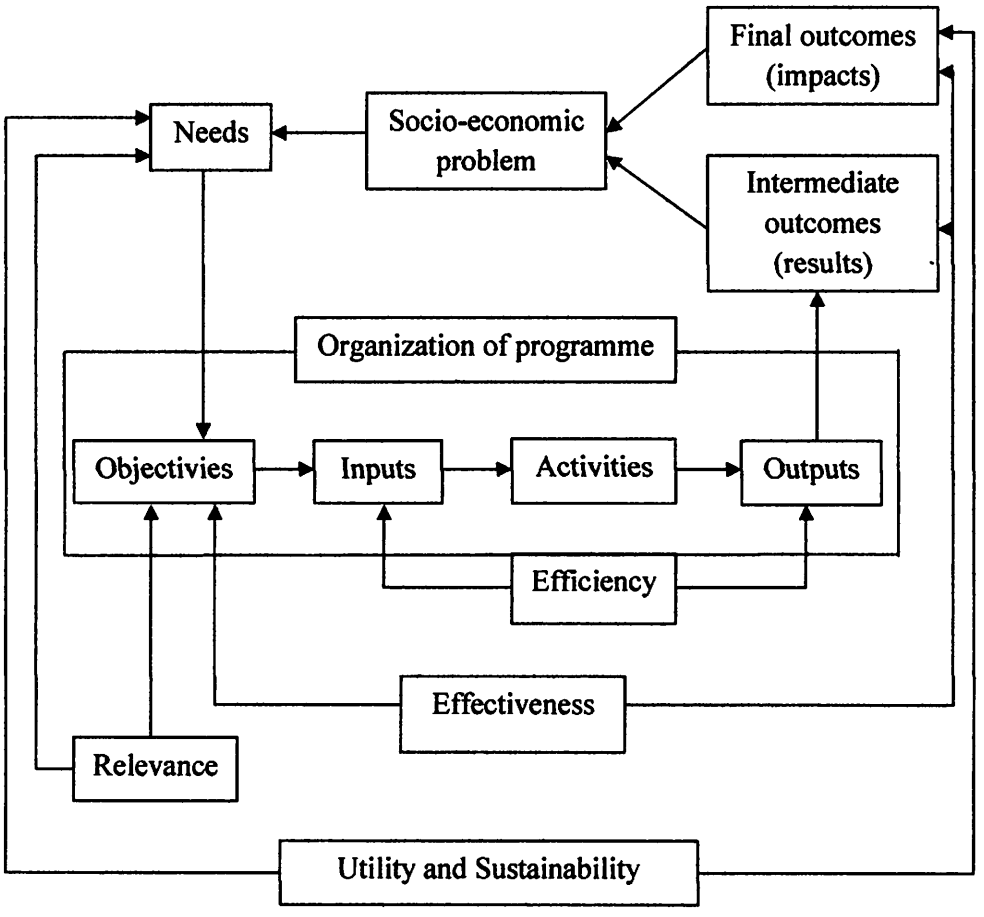

Bagan tersebut menjelaskan bahwa kinerja suatu program pembangunan dapat diukur dengan lima indikator yang mencangkup di dalamnya adalah *input*, *output* dan *outcome*. Indikator tersebut adalah efisiensi, efektivitas, relevansi, kegunaan dan keberlanjutan.[26] Masing-masing indikator tersebut mempunyai kriteria yang berbeda yaitu:

a. Efisiensi

Indikator efisiensi dalam pengukuran kinerja program pembangunan menyangkut rasio terbaik antara semua biaya yang

[26] *Ibid.*, hlm. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan selama implementasi dibandingkan dengan hasil sementara yang diperoleh.[27] Efisiensi program juga dapat diartikan sebagai kapasitas untuk memproduksi hasil secara maksimal sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan penggunaan tenaga, waktu dan sumber daya secara minimal.[28]

Jika menunjuk pada skema di atas, efisiensi diukur dengan melakukan perbandingan antara *input* dan *output*. Pengukuran rasio *input* dan *output* tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:[29]

$$\frac{OUTPUT}{INPUT}$$

Dari rumus perhitungan rasio di atas, suatu program semakin efisien jika rasio efisiensi cenderung di atas satu. Semakin besar angkanya, maka semakin besar tingkat efisiensinya dan begitu juga sebaliknya.[30] Artinya untuk menghasilkan tingkat efisiensi yang tinggi, maka *output* sebagai pembilang nilainya harus lebih besar daripada *input* sebagai penyebut.

b. Efektivitas

Efektivitas yaitu tingkat ketercapaian tujuan, atau memenuhi kebutuhan atau masalah yang dihadapi baik dalam ketepatan

---

[27] Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis*... (Yogyakarta: Gava Media, 2008), hlm. 79

[28] A. A. Gde Muninjaya, *Langkah-langkah Praktis Penyusunan Proposal dan Publikasi Ilmiah* (Jakarta: EGC, 2003), hlm. 33

[29] Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Tanpa kota: PT. Gelora Aksara Pratama, 2005), hlm. 77

[30] *Ibid.*, hlm. 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencapaian *output* maupun pencapaian *outcome.*[31] Dalam pembahasan program pembangunan, efektivitas selalu dikaitkan dengan apakah suatu hasil sementara yang didapatkan merupakan hasil yang memang telah direncanakan atau tidak.[32]

Efektivitas menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi *output.* Jika tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara sempurna, maka mekanisme kerja suatu program dapat dinyatakan efektif. Tetapi jika tujuan tersebut hanya tercapai sebagian atau tidak sempurna, maka program tidak bekerja secara efektif.[33] Jika dilihat dari bagan model pengukuran kinerja program, tingkat efektivitas suatu program dapat diukur dengan membandingkan antara tujuan program dengan hasil sementara (*result*) dan hasil akhir atau dampak.

Efektif berarti sukses secara keseluruhan dari berbagai alternatif kegiatan yang sudah dipilih untuk mencapai hasil yang diinginkan yaitu sesuai dengan tujuan.[34] Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu program harus jelas dirumuskan dan dapat dipahami tujuan yang ingin dicapai.

---

[31] Fadel Muhammad, *Reinventing Local Governmen...* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 23

[32] Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis...* (Yogyakarta: Gava Media, 2008), hlm. 79

[33] Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik...* (Tanpa kota: PT. Gelora Aksara Pratama, 2005), hlm. 78

[34] A. A. Gde Muninjaya, *Langkah-langkah Praktis...* (Jakarta: EGC, 2003), hlm. 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Relevansi

Relevansi yaitu apakah program yang diusulkan untuk diimplementasikan benar-benar sesuai dengan tujuan, kebutuhan atau masalah yang dihadapi.[35] Kriteria ini menunjukkan tentang kesesuaian program dengan masalah yang dihadapi atau dengan kata lain ketepatan sasaran.

d. Keekonomian atau kegunaan

Keekonomian yaitu apakah berbagai *input* yang dibutuhkan dalam program diperoleh dengan harga yang wajar dan dengan kualitas yang memadai.[36] Indikator ekonomi merupakan indikator tentang penggunaan *input*. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah program yang telah direalisasikan tersebut terlaksana secara ekonomis. Ini berarti apakah biaya pembangunan melebihi batasan anggaran yang telah disetujui.[37]

e. Keberlanjutan

Keberlanjutan dari hasil yang ingin dicapai yaitu apakah kebutuhan masyarakat dicapai secara berkelanjutan.[38] Artinya keberhasilan dari program memiliki prinsip *sustainability* atau tidak hanya berupa keberhasilan semu, yaitu dapat dirasakan sesaat saja.

---

[35] Fadel Muhammad, *Reinventing Local Governmen...* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 23

[36] *Ibid.*, hlm. 23

[37] Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik...* (Tanpa kota: PT. Gelora Aksara Pratama, 2005), hlm. 78

[38] Fadel Muhammad, *Reinventing Local Governmen...* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk berikutnya sasaran dari program kembali pada kondisi yang sama sebelum adanya program.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Lilik Suhartatik dengan judul "Peranan Dakwah dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Peran Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan/LPPMD dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik" yang diteliti pada tahun 2007.

   Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh LPPMD yaitu dengan program Penciptaan Lapangan Pekerjaan (PLK). Program tersebut merupakan kebijakan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam rangka Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM dan kemiskinan (PAM-DKB). Penciptaan lapangan pekerjaan tersebut dengan menggali potensi masyarakat. Sehingga lapangan pekerjaan yang tercipta sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat. Dalam penelitian ini mendiskripsikan bahwa bentuk penanggulangan kemiskinan oleh LPPMD yakni melalui pembuatan paving. Adapun bentuk realisasi program yakni dengan pengarahan dan sosialisasi oleh LPPMD mengenai potensi yang dimiliki oleh masyarakat Randegansari dalam PLK, yaitu dengan pembuatan paving.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Faridi dengan judul "Peran Budi Karya Perempuan (BKP) dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kampong Nelayan di Desa Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan" yang diteliti pada tahun 2011.

Dalam penelitian ini, obyek kajian yang diteliti adalah mengenai peran kelompok perempuan yang bernama Budi Karya Perempuan dalam memberdayakan ekonomi para perempuan yang ada di bawah naungannya, yaitu perempuan nelayan di Desa Batu Bintang Kecamatan Batumarmar Pamekasan. Pada penelitian ini diketahui bahwa dalam melakukan pemberdayaan ekonomi, digunakan tiga teknik yaitu dengan memberikan modal pinjaman dana, pelatihan keterampilan dan peningkatan pengetahuan kegamaan. Program tersebut seperti pelatihan-pelatihan sudah dirancang oleh lembaga BKP. Jadi anggota tinggal menerima bentuk pelatihan tersebut.

Dengan bantuan pinjaman dana yang diberikan, mereka dapat mengembangkan usaha skala mikro yang dijalankannya. Begitu juga dengan pemberian pelatihan keterampilan, sehingga para perempuan BKP mempunyai skill dan pengetahuan yang cukup dalam manjalankan usahanya. Dengan demikian, perempuan BKP dapat terus menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan kemampuan yang memadai dan juga didukung dengan modal yang cukup. Selain itu, ditingkatkannya pengetahuan keagamaan untuk membentengi masyarakat dalam menjalani kehidupan. Sehingga pola perilaku kehidupan senantiasa berada dalam bingkai syariat agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi yang ditulis oleh Churun'in dengan judul "Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (Studi Tentang Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Desa Kalimas Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya)", yang diteliti pada tahun 2009.

   Penelitian ini mendeskripsikan tentang perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di wilayah perkotaan. Telah disebutkan bahwa program penanggulangan kemiskinan khususnya di Desa Kalimas Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya ini meliputi bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan serta sarana prasarana perhubungan. Khususnya di bidang ekonomi, program yang dilakukan adalah dengan pemberian keterampilan menjahit, pemberihan alat-alat usaha dan pembinaan perkoperasian warga.

Pada penelitian di atas telah dapat diketahui bahwa dalam melakukan pengembangan masyarakat tidak dimunculkan partisipasi masyarakat. Posisi anggota atau masyarakat dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat atau kelompok hanya sebagai penerima program. Selain itu, dalam penelitian-penelitian di atas tidak pula dideskripsikan mengenai hasil sementara dari adanya program. Sehingga tidak diketahui bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi dari program yang sudah direalisasikan.

Berbeda dari penelitian yang telah ada, penelitian dengan judul "Program Gemerlap di Kabupaten Lamongan (Kajian Tentang Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan di Desa Kedungwangi dan Desa Ardirejo Kecamatan Sambeng Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamongan)" mendeskripsikan mengenai partisipasi masyarakat yang tidak dikesampingkan. Sehingga dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak hanya sebagi obyek program saja, tetapi menjadi subyek. Telah dijelaskan pula hasil sementara dari realisasi program serta tingkat efektivitas dan efisiensi dari program. Sehingga dapat ditentukan kelanjutan dari program, tetap dilanjutkan atau malah dihentikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id